

REVISI RENSTRA



KOMINFO

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016 -2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tim Penyusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menyelesaikan pekerjaan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021.

Tim penyusun Renstra bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 555/03/DKI-PS/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang SK Tim Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan masa waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu; **"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera"**.

Kami menyadari Renstra ini masih belum sempurna, untuk itu kami harapkan saran dan masukan demi kesempurnaan dari Renstra ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini tak lupa kami ucapkan terimakasih.

Painan, 03 Agustus 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN



JUNAIDI S. Kom. ME
NIP. 19700609 199703 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	19
BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Provinsi Sumatera Barat	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	24
BAB IV : Tujuan Dan Sasaran.....	26
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	26
BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan.....	30
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	32
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	36
BAB VIII : Penutup	37
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan OPD baru di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi, disamping beban tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

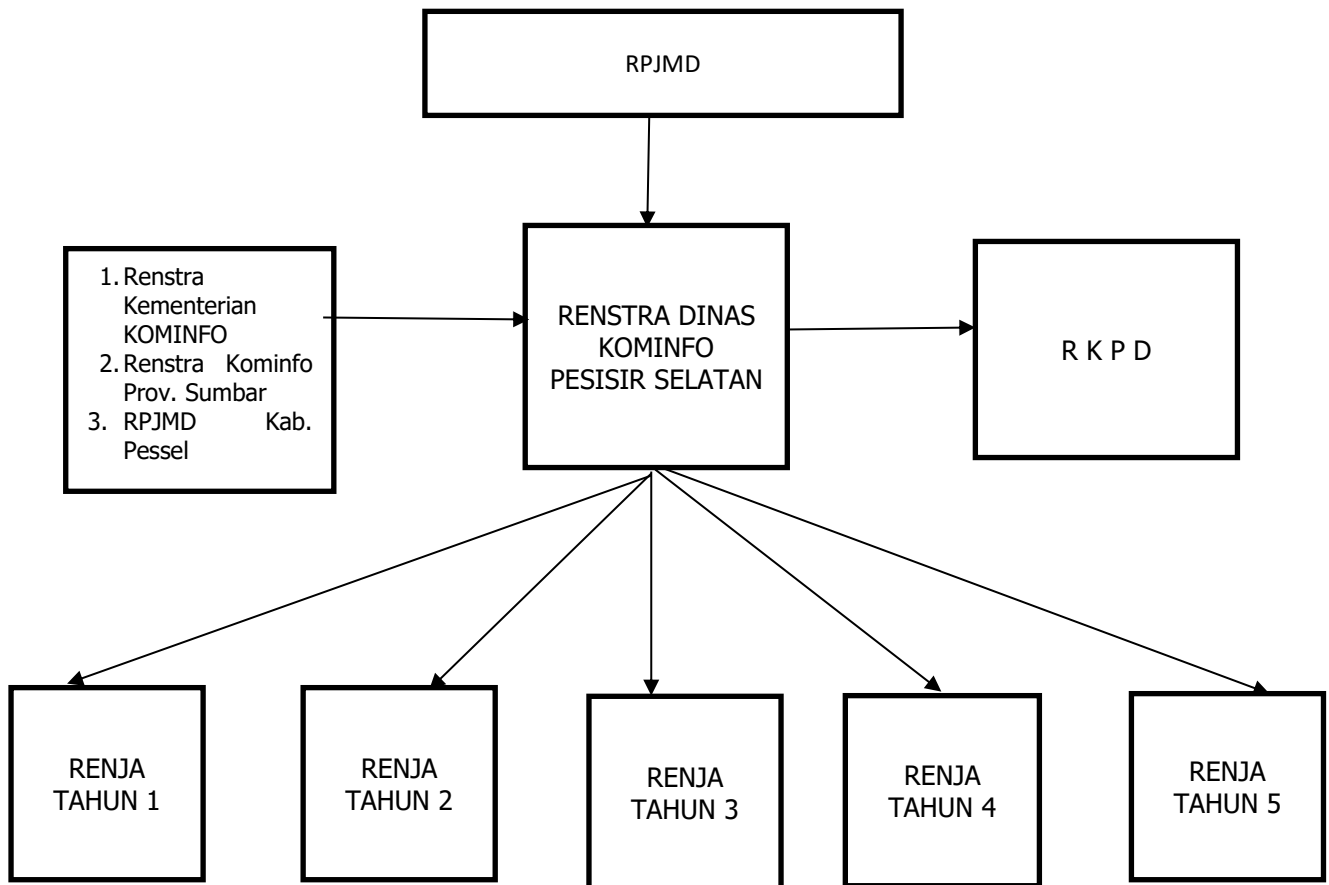
Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terpilih yaitu; **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, Misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan atau sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuannya jelas, yaitu tercapainya sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Dalam Bab II ini berisikan tentang :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo;

- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3.3 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat;
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN.

BAB IV ini memaparkan tentang:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang didalamnya juga terdapat paparan program dan kegiatan pokok sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, program kegiatan lintas Dinas Komunikasi dan Informatika serta program dan kegiatan kewilayahan serta Pendanaan Indikatif.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

BAB VII: PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Tupoksi :

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika.
3. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang komunikasi dan informatika

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKRETARIS

Tugas pokok :

1. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan dinas komunikasi dan informatika
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas komunikasi dan informatika.
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN

Tugas pokok :

Bidang Penyelenggaraan Penyelenggaraan E-Government dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika, Penyelenggaraan E-Government dan persandian

Fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang komunikasi, informatika, Penyelenggaraan E-Government dan persandian;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, Penyelenggaraan E-Government dan persandian;
3. perumusan bahan pelayanan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang komunikasi, informatika, Penyelenggaraan E-Government dan persandian;
4. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina Sumber Daya Manusia teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, dan persandian;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, Penyelenggaraan E-Government dan persandian; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI

Tugas Pokok :

Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistik dan pelayanan informasi.

Fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan bidang statistik dan pelayanan informasi;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang statistik dan pelayanan informasi;
3. perumusan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengaturan teknis dalam bidang statistik dan pelayanan informasi;
4. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan informasi publik pemerintahan untuk implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
5. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pembinaan lembaga penyiaran publik lokal radio dan atau televisi dan website pemerintah daerah sebagai wadah pelayanan penyebaran informasi pemerintah daerah;
6. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang statistik dan pelayanan informasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

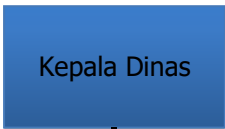
Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

Struktur Organisasi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang E Government (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Layanan E Government, Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi dan Seksi Persandian;
4. Bidang Statistik dan Pelayanan Komunikasi Publik (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika dan Seksi Statistik;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO KAB. PESISIR SELATAN



Kepala Dinas

Kasi Pengelolaan
Pelayanan
Informasi dan
Komunikasi
Publik

Kasi Desiminasi
Informasi dan
Pemberdayaan
Telematika

Kasi Statistik

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017 adalah sebanyak **18** (delapan belas) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA TK.I / IV b	2
2	PEMBINA/ IV a	1
3	PENATA TK. I / III d	3
4	PENATA / III c	7
5	PENATA MUDA TK.I / III b	1
6	PENGATUR TK. I, II/d	1
7	PENGATUR / II c	2
8	PENGATUR MUDA TK.I / II b	1
<i>JUMLAH</i>		<i>18</i>

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	4
3	S1 / D4	7
4	D III	1
5	D II	1
6	SMU/SMA Sederajat	5
7	SMP	-
8	SD	-
<i>JUMLAH</i>		<i>18</i>

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	3
	JUMLAH	6

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	12
2	FUNGSIONAL	-
	JUMLAH	12

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto	1	Buah	
5	Komputer/Destop	12	Buah	
6	Laptop	16	Buah	
7	Server	1	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
	Jumlah	45		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Smart City

Sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi.

Sampai akhir tahun 2021 tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi sebanyak 120 orang untuk seluruh Perangkat Daerah.

3. Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Target pertahun 50 informasi, penyampaian informasi masyarakat melalui mupen.

4. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan e government yang bersih dan baik.

5. Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target sampai dengan 2021 sebanyak 70 %

6. Promosi dan publikasi daerah melalui media elektronik.

Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 5 kali per tahun (wawancara atau siaran langsung di televisi) dan melalui media portal sebanyak 60 berita per tahun.

7. Pembinaan dan Pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Sampai Akhir tahun 2021 sudah terbentuk 45 Kelompok sedangkan target SPM sebesar 12 kelompok, sehingga capaian diatas target sebesar 90 persen.

8. Pembuatan Spanduk dan Baliho promosi dan Leaflet

Target per tahun 4 tema dan tercapai keseluruhan tema dengan capaian 100 persen.

9. Dialog interaktif dan dialog publik di LPPL Radio Langkisau FM target sebesar 12 kali per tahun tercapai 60 kali sehingga capaian 89 persen.

10. Penyebaran informasi melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 100 persen

11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah

Target per tahun tersedianya buku data statistik sektoral sebanyak 250 buah buku.

12. Peningkatan Pengamanan, Pengawasan Data Informasi Pemerintah Daerah

Dengan target sebanyak 3 Aplikasi yang sudah terintegrasi tanda tangan digital per tahun.

13. Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dengan target sebanyak 12.000 Data Informasi Publik per tahun.

14. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tantangan

1. Belum tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.

b. Peluang

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat,
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi

2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya				9 program 30 kegiatan	9 program 36 kegiatan	10 program 40 kegiatan	10 program 40 Kegiatan	9 program 30 Kegiatan	9 program 36 Kegiatan	9 program 36 kegiatan	10 program 40 kegiatan	10 program 40 kegiatan	-	100	100	97	93
2	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui unit penerangan keliling				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
3	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media on line/website				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
4	Terkoneksinya semua jaringan PD Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e government				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100	100	100	100
5	Tersedianya buku Dokumentasi Aplikasi (Manual Book Aplikasi)				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100
6	Adanya rehabilitas dan perawatan menara radio pemerintah daerah				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100
7	Tersedianya buku/laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah Kabupaten				100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	-	100	100	100	100

	Pesisir Selatan																	
8	Adanya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan				5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	-	100	100	100	100

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 s/d 2021**

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran pada Tahun ke –				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendapatan Asli Daerah										
	Hasil Retribusi Daerah	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100%	100%	100%	100%	100%
2	BELANJA	6,911,366,264	7,608,367,177	11,054,551,396	11,526,169,896	12,029,338,521	100%				
	Belanja Tidak Langsung	1,339,155,421	1,982,575,784	2,777,176,396	2,777,176,396	2,777,176,396	100%	100%	100%	100%	100%
	Belanja Langsung	5,572,210,843	5,956,791,393	10,287,577,375	10,748,993,500	11,252,162,125	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke –					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
	Hasil Retribusi Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
2	BELANJA	98.63	98.63	98.63	98.63	98.63		
	Belanja Tidak Langsung	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76		
	Belanja Langsung	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Tantangan

1. Belum tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal

b. Peluang

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat.
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2018.

b. Bidang E- Government

- 1) Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT)
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

c. Bidang Statistik dan Informasi Publik

1. Kurangnya SDM dibidang Statistik dan informasi publik.

2. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik dan Informasi Publik.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Sistem Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
6. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral
7. Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Belum adanya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi data pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Publik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi strategis
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi
15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
17. Mengembangkan wisata daerah
18. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan daerah terpencil

19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan

3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika
3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
5. Program Penyelenggaraan E-Government

b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan;
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum
4. Meningkatnya Pelayanan Kominfo

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi
3. Program Penyelenggaraan E- Government
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau ***E-Government*** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.

2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.1
Sinkronisasi Isu strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik
2.	Peningkatan Kualitas Layanan teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan teknologi informasi	Meningkatkan pengembangan dan pembangunan teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Telaahan Visi dan Misi RPJMD

Sebelum disusunnya visi dan misi OPD, terlebih dahulu dipaparkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

"Terwujudnya Masyarakat kabupaten Pesisir selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- Agamis : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera" dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Misi I yang berbunyi :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan dari Misi I yaitu :

Terwujudnya E-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2016-2021 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya e government menuju tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	2,59	2,8	3,0	3,2
		1. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	0	3,12	3,25	3,30	3,50
		2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0	75	81	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi kominfo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016.

b. Bidang Penyelenggaran E- Government dan Persandian

- 1) Rendahnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT)
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.
- 8) Belum adanya Penyelenggaraan Persandian serta Pengamanan dan Pengawasan Data Informasi Daerah.

c. Bidang Statistik dan Informasi Publik

- 1) Kurangnya SDM dibidang Statistik dan informasi publik.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik dan Informasi Publik.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Sistim Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
- 6) Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral
- 7) Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 8) Belum Optimalnya Penyebaran Informasi melalui Media elektronik.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya e government menuju tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi informasi	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi
	Meningkatnya Keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

5.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis

9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi
15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan
17. Mengembangkan wisata daerah
18. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dan daerah terpencil
19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis

5.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan jaringan dan layanan informasi publik bidang komunikasi dan informatika.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi
3. Program Penyelenggaraan E- Government
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

5.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

5.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE). Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau ***E-Government*** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik.
8. Tersedianya Pengamanan Persandian dan Pengawasan Data Informasi Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan berupa:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan meubiler
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6. Rehab gedung kantor
7. Pembangunan Media Center
8. Pembangunan Command Center
9. Pembangunan Ruang Server
10. Pembangunan studio radio langkisau

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pendidikan Sandiman

D. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika

E. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website
2. Publikasi dan Promosi Daerah

F. Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi dan Informasi

1. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah
4. Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi
5. Operasional LPPL Radio Langkisau FM
6. Pembangunan Infrastruktur TIK Kabupaten Pesisir Selatan
7. Operasional Pelayanan Informasi Publik
8. Pengumpulan Data Statistik Sektor (OPD)
9. Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka

G. Program Penyelenggaraan E Government

1. Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik
2. Pengembangan Smart City
3. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan data TIK

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM aparatur bidang Teknologi Informasi Komunikasi
2. Pengolahan Data Elektronik
3. Pembangunan jaringan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (Fiber Optik Mandiri)
4. Pembangunan Pengembangan Smart City
5. Operasional penerangan keliling, pameran dan posko informasi
6. Operasional Pelayanan Informasi Publik
7. Pengumpulan dan penyebaran informasi Daerah Melalui Website
8. Pengumpulan Data Statistik Sektor
9. Pembinaan Komunikasi dan Informasi Masyarakat
10. Publikasi dan Promosi Daerah
11. Pembangunan Media Center dan Command Center
12. Pengelolaan sumber daya persandian pemerintah daerah (sumber daya manusia sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi)
13. Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di pemerintah daerah.
14. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
15. Pelaksanaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah

6.2 Faktor kunci keberhasilan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai berikut:

Kekuatan (strengths), yang dimiliki dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan antara lain;

1. Adanya visi dan misi yang jelas,
2. Politicalwill Pemerintah Daerah
3. Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan,
4. Adanya rasa kebersamaan antar petugas / aparat dalam melaksanakan tugas.

Kelemahan (weaknesses) yang ada antara lain;

1. Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya,
2. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap,
3. Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya,
4. Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai sistem manajemen yang baik,
5. Kurangnya tenaga operasional dilapangan.
6. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional.
7. Belum memadai sarana dan prasarana yang diperlukan

Peluang (opportunities) yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legeslatif Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membangun kawasan wisata
4. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang dibutuhkan,

5. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan informatika.

Tantangan (threats) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi:

1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi
2. Struktur kota belum tertata secara baik,
3. Ketersediaan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi yang memadai
4. Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Komunikasi dan Informatika secara utuh dan menyeluruh antara legislatif dan eksekutif belum ada kesepakatan.
5. Kesejahteraan pegawai yang belum merata,
6. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan Informatika.

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal dinas Komunikasi dan Informatika adapun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal.

Dari analisis SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika secara intens dan terus menerus ke seluruh jajaran dan OPD terkait.
2. Optimalisasi prasarana-sarana kerja dan kemampuan tenaga ahli.
3. Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa kebersamaan.
4. Pemerataan dan peningkatan kemampuan serta penambahan personil aparat.
5. Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan serta menghimpun data yang akurat / dapat dipertanggung jawabkan secara terus menerus.untuk melaksanakan visi dan misi.

7. Melengkapi sasaran pokok/ utusan

Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

[illegible]

			Kegiatan : Pelatihan/B imbingan Teknis SDM TIK.	Peningkata n Akses Informasi dan Komunikasi		Bimtek pelaya nan inform asi dan TIK 10 ASN	120.000.0 00,-	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 90 ASN	160.000.0 00,-	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 120 ASN	190.000. 000,-	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 130 ASN	200.000. 000,-	Bimtek pelayanan informasi dan TIK 140 ASN	Diskominfo	Kab.Pessel	
			Program Peningkata n Akses Informasi dan Komunikasi														
			Kegiatan Peningkata n MasterPlan			Master Plan 1 bh	120.000.0 00,-	Master Plan 1 bh	125.000.0 00,-	Master Plan 1 bh	215.000. 000,-	Master Plan 1 bh	225.000. 000,-	Master Plan 1 bh	Diskominfo	Kab.Pessel	
			Kegiatan Penyelengg araan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah			Penga manan Aplika si 7 bh	60.000.00 0,-	Pengaman an Aplikasi 9 bh	70.000.00 0,-	Pengaman an Aplikasi 14 bh	80.000.0 00,-	Pengama nan Aplikasi 18 bh	90.000.0 00,-	Pengama nan Aplikasi 20 bh	Diskominfo	Kab.Pessel	
			Kegiatan Pembangu nan Infrastrukt ur TIK		Media Inform asi dan	500.000.0 00,-	Media Informa si dan publikas	900.000.0 00,-	Media Informa si dan publika	1.700.00 0.000,-	Media Inform asi dan publika	2.500.00 0.000,-	Media Inform asi dan publika	Diskominfo	Kab.Pessel		

			Kab.Pesisir Selatan			publikasi secara elektronik		isi secara elektronik		isi secara elektronik		isi secara elektronik		isi secara elektronik		
			Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan			Perda dan Perbup 1 bh	40.000.000,-	Perda dan Perbup 1 bh	45.000.000,-	Perda dan Perbup 1 bh	50.000.000,-	Perda dan Perbup 1 bh	60.000.000,-	Perda dan Perbup 1 bh	Diskominfo	Kab.Pessel
			Program Penyelenggaraan E-governement	Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan smart city												
			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik			Pembuatan dan Pengembangan aplikasi 8 bh	200.000.000,-	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi 10 bh	300.000.000,-	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi 14 bh	450.000.000,-	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi 16 bh	550.000.000,-	Pembuatan dan Pengembangan aplikasi 18 bh	Diskominfo	Kab.Pessel
			Kegiatan Pengembangan Smart City			Jaringan TIK melalui	3.000.000.000,-	Jaringan TIK melalui	4.500.000.000,-	Jaringan TIK melalui	4.500.000.000,-	Jaringan TIK melalui	4.500.000.000,-	Jaringan TIK melalui	Diskominfo	Kab.Pessel

[illegible]

[illegible]

			dan Komunikasi												
			Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM			Terbinanya Media Tradisional sebanyak 15 KIM	70.000.000,-	Terbinanya Media Tradisional sebanyak 15 KIM	70.000.000,-	Terbinanya Media Tradisional sebanyak 15 KIM	90.000.000,-	Terbinanya Media Tradisional sebanyak 15 KIM	95.000.000,-	Terbinanya Media Tradisional sebanyak 15 KIM	Diskominfo Kab.Pessel
			Kegiatan Operasional Penerangan Keliling dan Posko Informasi			Tersampaikan Informasi Daerah 50 Kali	50.000.000,-	Tersampaikan Informasi Daerah 50 Kali	60.000.000,-	Tersampaikan Informasi Daerah 50 Kali	60.000.000,-	Tersampaikan Informasi Daerah 50 Kali	70.000.000,-	Tersampaikan Informasi Daerah 50 Kali	Diskominfo Kab.Pessel
			Kegiatan Operasional LPPL Radio Langkisau FM			Terselenggaranya Operasional 12 bulan	100.000.000,-	Terselenggaranya Operasional 12 bulan	350.000.000,-	Terseleenggaranya Operasional 12 bulan	370.000.000,-	Terselenggaranya Operasional 12 bulan	370.000.000,-	Terseleenggaranya Operasional 12 bulan	Diskominfo Kab.Pessel

			Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi			Tersedianya Pelayanan PPID 45	100.000.000,-	Tersedianya Pelayanan PPID 45	150.000.000,-	Tersedianya Pelayanan PPID 45	200.000.000,-	Tersedianya Pelayanan PPID 45	250.000.000,-	Tersedianya Pelayanan PPID 45	Diskominfo	Kab. Pessel
			Kegiatan Penyediaan Data Statistik Pesisir Selatan Dalam Angka			Tersedianya buku PSDA 100 bh	100.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	150.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	200.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	250.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	Diskominfo	Kab. Pessel
			Kegiatan Penyediaan Data Sektoral			Tersedianya buku PSDA 100 bh	70.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	80.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	90.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	100.000.000,-	Tersedianya buku PSDA 100 bh	Diskominfo	Kab. Pessel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan

secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;

8. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
10. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah);
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2016
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan melalui PPID	Kelompok Informasi		Terbinanya 5 Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya 15 Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya 25 Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya 25 Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya 30 Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya 35 Kelompok Informasi Masyarakat
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Pesentase		Tersedianya jaringan internet di Kab.Pesisir Selatan	Tersedianya jaringan internet di Kab.Pesisir Selatan	Tersedianya jaringan internet di Kab.Pesisir Selatan	Tersedianya jaringan internet di Kab.Pesisir Selatan	Tersedianya jaringan internet di Kab.Pesisir Selatan	Terintegrasi Jaringan Smart City
3.	Tersedianya standar pengamanan persandian dan	Pesentase		Tersedianya pengamanan persandian	Tersedianya pengamanan persandian	Tersedianya pengamanan persandian	Tersedianya pengamanan persandian	Tersedianya pengamanan persandian	Pengamanan Persandian terhadap aplikasi
4.	terpublishnya data statistik sektoral			Tersedianya data statisitik sektoral serta PSDA	Tersedianya data statisitik sektoral serta PSDA	Tersedianya data statisitik sektoral serta PSDA	Tersedianya data statisitik sektoral serta PSDA	Tersedianya data statisitik sektoral serta PSDA	Data yang tervalidasi dengan baik menjadi single data

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggung
			2016	2017	2018	2019	2020	2012	jawab
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat									
1. Cakupan Pelayanan Komunikasi	%	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}} \times 100\%$	-	30	40	50	60	70	Dinas Kominfo

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Penyelenggaran Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 2	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	0	0	0	3,12	3,25	3,30	3,50	3,35
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0	0	0	75	81	85	90	90

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 11 202 Agustus 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN


JUNARDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002